

Kota Tua dan Istiqlal Dipenuhi PKL, Pj Heru: Perlu Ada Penataan

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, memang harus ada pengawasan dan edukasi menyoal maraknya pedagang kaki lima (PKL) yang memenuhi trotoar di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat dan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

Meski begitu, pihaknya tidak memerinci cara dan langkah yang akan diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait mengatasi masalah tersebut. "Harus ada pengawasan dan edukasi. Perlu ada penataan," kata Heru saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (10/1).

Para PKL kini kembali memenuhi trotoar Kota Tua setelah pada 2018 mereka direlokasi ke Kota Intan. Tempat relokasi, hanya berkisar 500 meter dari daerah low emission zone (LEZ) Kota Tua, namun para pedagang baru-baru ini kembali memenuhi lokasi awal.

Keluhan itu juga dirasakan oleh seorang warganet @RKevin_Ramdhani, yang mengabarkan kawasan Kota Tua semakin tidak teratur. Hal itu karena PKL yang sebelumnya dipusatkan di satu titik, kini bisa berjalan bebas di dekat halte Kota Tua hingga menyebabkan macet.

"Pemandangan sore ini di depan Stasiun Jakarta Kota. Jadi makin semrawut begini wkwk," ujarnya.

Kemudian, ada yang membalas jika trotoar di Masjid Istiqlal kini juga dipenuhi trotoar. Hal itu terjadi karena pengawasan dari Pemprov DKI yang kendur.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menyoroti banyaknya pedagang kaki lima (PKL) di kawasan wisata Kota Tua dan Masjid Istiqlal, baru-baru ini. Menyikapi maraknya PKL mengokupansi trotoar, Gembong meminta Pemprov DKI Jakarta agar bisa memperkuat edukasi dan pengawasan.

Pasalnya, relokasi para PKL dari lokasi terkait telah dilakukan sebelumnya ke Kota Intan, tak jauh dari Kota Tua sejak 2018. "Harusnya pembeli yang datangin PKL bukan sebaliknya. Ini kan PKL datangin pembeli," kata Gembong.

Dia mengaskan, permasalahan ketertiban yang terkait dengan PKL hanya sebatas pengawasan dan edukasi. Sehingga, Gembong mendorong Pemprov DKI perlu memperkuat langkah efektif di dua hal tersebut.

"Perlu ada sosialisasi, setelah dilakukan sosialisasi selanjutnya pengawasan," ujar Gembong. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANT



TIMNAS INDONESIA TIBA DI TANAH AIR
Pesepak bola Timnas Indonesia tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (10/1). Timnas Indonesia gagal melaju ke final Piala AFF 2022 usai kalah dari Vietnam dengan agregat skor 0-2.

Kadishub DKI: Aturan Jalan Berbayar Masih Dibahas, Target Rampung 2023

"Kami masih fokus pada penuntasan regulasinya. Nah untuk regulasinya tentu dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan daerah ini sudah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta dan sudah ada beberapa kali pembahasan," kata Syafrin Liputo.

JAKARTA (IM) - Pemprov DKI Jakarta menegaskan regulasi mengenai pengendalian lalu lintas secara elektronik atau electronic road pricing (ERP) masih dibahas. Kepala Dinas Perhubungan

DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan pembahasan regulasi itu ditargetkan rampung tahun ini.

"Penerapan ini akan dilaksanakan setelah legal aspeknya selesai. Ditargetkan tahun ini

persiapan regulasinya bisa selesai," kata Syafrin Liputo saat dihubungi, Selasa (10/1).

Syafrin menjelaskan regulasi yang dibuat berbentuk Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik. Sejauh ini, regulasi tersebut telah masuk ke program pembentukan peraturan daerah DPRD DKI Jakarta.

"Kami masih fokus pada penuntasan regulasinya. Nah untuk regulasinya tentu dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan daerah ini sudah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta dan sudah ada beberapa kali

pembahasan," jelasnya.

Pembahasan Raperda dilakukan antara Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD. Meskipun sudah berbentuk Raperda, pembahasan regulasi ERP belum sampai kepada membebed pasal per pasal.

"Jadi masih menyampaikan paparan umum terkait dengan urgensi di perlukannya regulasi ini," terangnya.

Syafrin menyebut dokumen Raperda sudah ada sejak lama. Karena itu, pihaknya bakal melakukan sejumlah penyesuaian saat pembahasan Raperda bersama dewan.

"Tentu dari sisi itu jadi kami selaraskan dengan aturan dunia ya, sekarang kan di era revolusi 4.0 maka tentu untuk

pengaturan secara komprehensif di Jakarta kita sesuaikan. Oleh sebab itu untuk hulunya tidak lagi hanya satu sistem ERP atau sistem jalan berbayar elektronik tapi langsung keseluruhan dia sistem pengendalian angkutan secara elektronik. Itu lebih kesana supaya bisa mengatur lebih komprehensif untuk mengatur ke depan," terangnya.

Sedangkan untuk tarif diusulkan mulai dari Rp 5.000-19.000. Angka ini didapat berdasarkan hasil kajian sejumlah ruas jalan.

"Ada rincian kemarin kalau nggak salah di angka Rp 5 ribu sampai dengan 19 ribu itu akan di antara angka itu," ucapnya. ● yan



FOTO: ANT

RUANG PUSAT PEMBELAJARAN BENCANA IBU KOTA

Pelajar mengikuti simulasi penanganan bencana kebakaran di ruang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Selasa (10/1). Ruang KIE Kebencanaan merupakan ruang yang digunakan untuk pusat pembelajaran kebencanaan di Ibu Kota.

Kolong Tol Becakayu Sepanjang Kalimantan Bakal Ditata

JAKARTA (IM) - Pemprov DKI Jakarta menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) penataan lahan kolong tol Bekasi Cawang Kampung Melayu (Becakayu). Penataan akan dilakukan di sepanjang saluran Kalimantan di wilayah DKI Jakarta.

Penandatanganan kesepakatan bersama dan PKS dilakukan oleh Wali Kota Jakarta Timur, M. Anwar, bersama Direktur Teknik dan Operasi PT Kresna Kusuma Dyandra Marga, Aryo Gunanto dan Direktur Operasi dan Pemeliharaan Perusahaan Umum Jasa Tirta II, Anton Mardiyono. Acara tersebut turut dihadiri Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Dalam kesempatan itu, Heru sekaligus meninjau kegiatan kerja bakti dan penanaman bibit pohon oleh suku dinas terkait. MoU ini disetujui dalam rangka penataan kawasan. Melalui penanaman pohon, diharapkan menghadirkan banyak manfaat yang bisa dirasakan warga sekitar, salah satunya terjaganya mutu air baku.

"Jangan sampai air warga Jakarta tercemar dengan limbah-limbah yang tidak baik. Karena dikonsumsi oleh warga dan digunakan setiap hari," kata Heru dalam keterangan tertulis, Selasa (10/1).

Heru juga menekankan agar warga sekitar mampu memanfaatkan lahan tersebut secara tepat guna dan menjaganya agar tetap terawat dengan baik.

"Tempat ini harus hijau, harus rapi, tertata, dan terawat. Setelah itu warga juga bisa memanfaatkan dengan baik dan tidak untuk berju-

alan. Kalau untuk jalan sehat silakan, diambil hasil panennya silakan, tapi (tetap) dijaga dengan baik," ujarnya.

Di samping itu, Wali Kota Jakarta Timur, M. Anwar menutarakan pentingnya pemeliharaan usai dilakukan penghijauan di kawasan tersebut. Anwar menambahkan, nantinya sebanyak 200 petak akan serawat tanaman di sepanjang jalur tersebut. Penanaman juga akan dilanjutkan ke titik yang belum ditanam. Meski demikian, ia mengharapkan peran serta masyarakat untuk bersamasama menjaga dan merawat kawasan hijau tersebut.

"Makanya harus ditata dengan rapi, dengan baik, kita hijaukan dan ada pembatasan melalui MoU tadi. Ke depan tidak ada parkir-parkir liar disini. Kita akan tata terus dan terus hijaukan. Diharapkan Kota Bekasi bisa menyesuaikan seperti Jakarta Timur," ujar Anwar.

"Saya akan terus menanam pohon di sini setiap Jumat dan Minggu. Kita juga akan edukasi warga untuk merawat dan menjaga lahan ini dengan baik. Kawasan ini merupakan paru-paru kota, sepanjang 5 km. Pemkot ada keterbatasan anggota, makanya kita tidak bisa sendiri dan butuh bantuan masyarakat," sambungnya.

Sementara itu, perwakilan PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) Aryo mengaku senang bisa bekerja sama dalam penataan wilayah di DKI Jakarta tersebut. Menurutnya kesempatan tersebut merupakan hal yang menggembirakan bagi KKDM. ● yan

Pajak Tanah Sumbang PAD Kota Depok Terbesar pada 2022

DEPOK (IM) - Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Wahid Suryono mengatakan, pajak daerah perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) menjadi penyumbang terbesar pendapatan asli daerah (PAD) Kota Depok pada 2022. "Pajak BPHTB merupakan pemasok terbesar tahun ini," kata Wahid di Balai Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (10/1).

Dia mengatakan, dari target yang ditetapkan senilai Rp 468,75 miliar, realisasi yang tercapai sebesar Rp 517,64 miliar. Artinya target telah terpenuhi bahkan melampaui sebanyak 110 persen.

"Alhamdulillah, pajak BPHTB melebihi target sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Ini saja masih ada dua hari jelang tutup tahun 2022. Potensi bertambah pasti ada," jelas Wahid.

Dia menyebutkan, kondisi itu terjadi karena perekonomian masyarakat yang mulai pulih dari dampak pandemi Covid-19. Transaksi jual atau beli tanah maupun lahan pun meningkat.

"Kami optimistis bahwa target dari sektor lain juga dapat terpenuhi, bahkan melampaui realisasi pajak daerah yang telah ditetapkan," kata Wahid.

BKD Kota Depok menyiapkan terobosan inovatif dengan mengoptimalkan potensi PAD melalui program Go 2T, sebagai upaya akselerasi pencapaian PAD senilai Rp 2 triliun pada 2024. "Ada lima inovasi yang mendukung program Go 2T," ucap Wahid.

Pertama, yaitu Gerakan Mengejar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (Gempita PBB). Konsep Gempita PBB adalah menyusun kebijakan yang mengatur tentang stimulus piutang pajak bumi dan bangunan (PBB), melakukan penelusuran, bersinergi dengan camat, lurah, RT dan RW, serta Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Bapenda Jawa Barat.

Inovasi kedua adalah Sistem Informasi Aplikasi Piutang Daerah (SIAP-PD). Konsep SIAP-PD yaitu membuat aplikasi dengan melakukan migrasi data saldo awal audited piutang

pajak daerah. Selanjutnya, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan.

Inovasi ketiga berupa optimalisasi pengelolaan lapangan olahraga dan fasilitas UMKM melalui kerja sama dengan kelompok masyarakat (Oplosan Emas). Program itu sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah kurangnya optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah (BMD).

Inovasi keempat, yaitu Sistem Integrasi Penerimaan Keuangan Pendapatan Daerah (Sipkanda). Hal itu merupakan sebuah aplikasi pendukung untuk memudahkan pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah.

Kelima inovasi aplikasi e-Payment. Sistem Informasi aplikasi penatausahaan belanja daerah berbasis elektronik, dimulai dari proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sampai proses penerbitan dan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang sudah paperless. ● yan

Pemprov DKI akan Bina Kusir Delman di Monas

JAKARTA (IM) - Pemprov DKI Jakarta bakal membina para kusir delman di kawasan Monas. Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana mengatakan upaya ini dilakukan untuk mempertahankan delman sebagai daya tarik kebudayaan sekaligus pariwisata di kawasan Monas.

"Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pembinaan dan pengelolaan terhadap para kusir delman di kawasan Monas. Hal ini bertujuan agar daya tarik kebudayaan dan pariwisata delman di Jakarta tetap terjaga," kata Iwan dalam keterangan tertulis, Selasa (10/1).

Iwan menyampaikan eksistensi delman di kawasan Monas menjadi daya tarik wisata yang masih terjaga hingga sekarang. Iwan menyebut delman adalah daya tarik wisata yang telah membantu menyediakan lapangan pekerjaan dan menambah penghasilan bagi para kusir.

Di sisi lain, Iwan menekankan larangan delman beroperasi di kawasan Monas masih dalam tahap kajian. Sementara ini, delman boleh melenggang di kawasan Monas setiap hari Sabtu dan Minggu.

"Delman tetap bisa beroperasi pada hari Sabtu dan Minggu di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, dengan tertib dan terkendali sembari menunggu surat edaran (SE) dilakukan kajian lebih lanjut," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengizinkan delman beroperasi setiap Sabtu dan Minggu di sekitar kawasan Monas. Heru mengingatkan agar kebersihan dijaga.

"Saya imbau masing-masing delman menjaga kebersihan," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (9/1).

Heru mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan soal bau tak sedap kotoran kuda. Di sisi lain, pihaknya tak bisa semena-mena melarang delman di sekitar Monas setiap hari.

Heru menegaskan pihaknya tak pernah melarang delman di sekitar kawasan Monas.

Dia mengatakan saat ini Pemprov DKI hanya melakukan pengaturan agar keselamatan dan kesehatan dapat terpenuhi. ● yan

Ratusan Makam di TPU Semper Terendam Banjir

JAKARTA (IM) - Ratusan makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Semper, Giling, Jakarta Utara terendam banjir.

Berdasar pantauan di lokasi, banjir sampai menutupi nisan yang berjejer di unit Islam AA II TPU Semper. Terlihat pula rumput liar tumbuh di sekitar area pemakaman yang terendam air itu. TPU Semper terendam banjir dengan ketinggian sekitar 20 sentimeter hingga 1 meter, yang menenggelamkan beberapa makam.

Peziarah tampak kesulitan untuk menemukan makam di TPU Semper. Mereka harus melompati makam agar tidak terkena air.

Salah satu penjaga makam bernama Husi Oji mengatakan, banjir yang merendam kawasan itu berlangsung sejak awal 2023.

"Dari malam tahun baru itu kan hujan sampai pagi. Nah sekitar jam 10.30 WIB baru reda itu (air) sudah mulai tinggi," ungkap Husi saat ditemui di TPU Semper, Selasa (10/1).

Kedalaman banjir di TPU Semper, lanjut dia, pernah mencapai 1,5 meter. Sehingga, tak heran bila sejumlah nisan yang berbaris di sana sudah tak terlihat lagi.

"Kalau di sini di jalanan aja paling ketinggian air 20 sentimeter. Kalau di dalam bisa 1,5 meter," katanya.

Husi memperkirakan ada sekitar 800 makam yang terendam air. Menurutnya, banjir yang kerap terjadi diakibatkan saluran air yang kecil dan membuat aliran tersendat. "Salurannya kecil itu kan ke kali kecil tuh, di situ mandek," jelas Husi. ● yan



FOTO: ANT

RENCANA SISTEM PENJUALAN LPG 3 KG

Pekerja menata tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 kilogram untuk dikirim ke pedagang di Bekasi, Selasa (10/1). PT Pertamina Patra Niaga berencana menjual LPG 3 kg hanya melalui penyalur/sub penyalur resmi Pertamina agar bisa melakukan verifikasi data pembeli yang memang berhak mendapatkan subsidi.

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa akan dilakukan penjualan/pengalihan atas seluruh saham dalam PT JASCLEANS HYDRO POWER, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta selatan dan beralamat di South Quarter Tower A, Lantai 17, Jl. R.A. Kartini Kav.8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430 ("Perseroan") kepada pihak lain dimana sebagian besar saham tersebut akan dialihkan kepada PT MANGALA GITA KARYA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Utara, sehingga mengakibatkan perubahan pengendalian atas Perseroan ("Akuisisi").

Sehubungan dengan hal tersebut, setiap pihak yang berkeberatan atas rencana Akuisisi dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai bukti yang sah kepada Direksi Perseroan ke alamat tersebut di atas paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 11 Januari 2023
Direksi Perseroan